

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang optimal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala dan ketimpangan antara harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diterima. Hal ini mendorong masyarakat untuk menyampaikan aduan atau keluhan mereka melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital.

Program Halo RRI di RRI Bandung hadir sejak Oktober 2024 sebagai ruang dialog interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau aduan terkait pelayanan publik secara langsung kepada instansi terkait. Program berdurasi 60 menit ini menampilkan narasumber dari lembaga pemerintah atau pihak berwenang, dengan tujuan menjembatani aspirasi warga dan solusi dari pihak berwenang. Namun, berdasarkan observasi awal peneliti, jumlah aduan yang masuk melalui Halo RRI masih tergolong minim. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program memiliki potensi besar, publikasi dan pemanfaatannya oleh masyarakat masih belum optimal.

Kondisi tersebut kontras dengan tingginya jumlah laporan di saluran pengaduan publik lain seperti LAPOR! dan Ombudsman RI, meskipun layanan tersebut juga belum sepenuhnya efektif. Misalnya, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terkait penumpukan sampah di Pasar Induk Gedebage yang ditindaklanjuti setelah diangkat di Halo RRI menunjukkan bahwa radio publik

dapat berperan sebagai pemicu respons cepat dari instansi. Namun di sisi lain, belum ada sistem evaluasi formal dan publikasi tindak lanjut yang terstruktur, sehingga sebagian pendengar tidak mengetahui perkembangan akhir aduan mereka.

Pemerintah Kota Bandung sendiri melalui SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) telah mengadopsi sistem pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Namun, berdasarkan berbagai penelitian, efektivitas layanan digital ini masih belum optimal.

Temuan penelitian Ginandjar et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem LAPOR! di Dinas Perhubungan Kota Bandung masih mengalami gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, serta pengulangan aduan yang belum terselesaikan secara menyeluruh (Ginandjar et al., 2023).

Sementara itu, penelitian terbaru dari Fatimah Azzahra et al. (2025): *“Kualitas Pelayanan Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung”* menemukan bahwa: Kualitas pelayanan melalui aplikasi LAPOR! masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek empati, ketanggapan (*responsiveness*), serta keandalan sistem (*reliability*) (Azzahra et al., 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun saluran digital telah tersedia, masih terdapat keterbatasan dalam memenuhi ekspektasi publik, baik dari sisi teknis maupun interaksi layanan. Hal ini membuka peluang bagi media alternatif

seperti radio publik, dalam hal ini RRI Bandung, untuk berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan aduan secara lebih responsif dan interaktif.

Di sisi lain, berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2023 dari Pemerintah Kota Bandung (PPID Kota Bandung), diketahui bahwa dari total 60 Perangkat Daerah, hanya 59 yang memenuhi target kategori pelayanan publik “Baik” (nilai minimal 85). Artinya, masih ada satu perangkat daerah yang belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat satu instansi yang belum memberikan pelayanan publik sesuai standar kualitas yang diharapkan. (Sumber: Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023).

Berdasarkan data dari Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, masih terdapat unsur pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Unsur waktu penyelesaian mengindikasikan bahwa jangka waktu penyelesaian layanan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga dapat menghambat efektivitas pelayanan. Temuan ini semakin menguatkan urgensi perlunya penguatan kanal-kanal komunikasi publik yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang responsif.

Dalam lingkup perluasan cakupan kajian, peneliti tidak hanya memfokuskan fenomena pada wilayah Kota Bandung, tetapi juga memperluas jangkauan pada level provinsi, yakni di Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengawasan pelayanan publik di tingkat makro, serta bagaimana mekanisme penanganan aduan masyarakat dijalankan

secara institusional oleh lembaga pengawas tersebut. Berikut peneliti mengolah data Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI selama Triwulan II tahun 2024:

Tabel 1.1. Jumlah Pengaduan Masyarakat Triwulan II (2024)

Kantor Perwakilan Ombudsman RI	April	Mei	Juni	Grand Total
Aceh	13	22	140	175
Bali	71	111	50	232
Banten	11	13	15	39
Bengkulu	11	26	34	71
DI Yogyakarta	22	91	29	142
Gorontalo	0	55	1	56
Jakarta Raya	29	63	43	135
Jambi	25	30	18	73
Jawa Barat	21	108	40	169
Jawa Tengah	57	54	18	129
Jawa Timur	48	46	39	133

Sumber: Ombudsman RI

<https://data.ombudsman.go.id/keasistennan-utama-pengaduan-masyarakat/jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-yang-masuk-ke-ombudsman-ri-triwulan-2-tahun-2024>

Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Widya Wicaksono dan Rima Rahmawati (2023) berjudul *“Analisa Deskriptif Penanganan Pengaduan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat”* menjadi rujukan penting dalam melihat kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pengaduan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Di antaranya adalah belum adanya klasifikasi laporan pengaduan berdasarkan tingkat kerumitannya, rendahnya kooperasi antara pelapor dan pihak terlapor, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tidak seimbangnya beban

kerja dengan jumlah laporan yang masuk. Selain itu, belum terdapat standar waktu yang jelas dalam proses penyelesaian laporan, yang mengakibatkan efektivitas pengawasan menjadi belum optimal (Wicaksono & Rahmawati, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun Ombudsman memiliki peran strategis dalam pengawasan publik, namun pelaksanaannya di tingkat provinsi masih membutuhkan penguatan dari sisi sistem, sumber daya, hingga pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan instansi pelayanan publik. Hal ini menjadi penting untuk digarisbawahi, mengingat efektivitas Ombudsman sebagai lembaga pengawas turut menentukan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di suatu wilayah.

Dengan melihat berbagai dinamika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kota Bandung telah mengalami banyak kemajuan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek diseminasi informasi, konsistensi SDM, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam kasus inilah, media massa, khususnya radio publik seperti Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung, memainkan peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk konkret dari peran ini adalah melalui program Hallo RRI, yang menjadi wadah masyarakat untuk menyuarakan saran, dan aduan terhadap layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:

“Penyiaran diartikan sebagai aktivitas menyebarluaskan siaran melalui perangkat pemancar dan/atau sarana transmisi, baik yang berada di darat, laut, maupun antariksa, dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lain, sehingga dapat diterima secara serempak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran.” (KPI Pusat, <https://www.kpi.go.id/>)

Dalam hal ini audiens berada pada posisi mental yang pasif, di mana pemahaman mereka terhadap pesan sangat bergantung pada kejelasan kata-kata yang disampaikan oleh penyiar. Morissan (2018) dalam bukunya Manajemen Media Penyiaran menjelaskan bahwa:

“Media penyiaran, sebagai bagian dari media massa, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Media seperti radio dan televisi memiliki kemampuan menjangkau ruang secara luas, namun tidak memiliki kendali atas waktu karena siaran hanya dapat dinikmati pada saat itu juga ketika disiarkan.” (Morissan, 2018:300).

Berdasarkan hal tersebut, siaran radio maupun televisi dapat diakses oleh khalayak yang tersebar di berbagai wilayah dalam waktu yang bersamaan selama berada dalam jangkauan sinyal transmisi. Sejalan dengan hal tersebut, media massa, khususnya radio, tetap memiliki peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu wujud dari peran ini adalah melalui program siaran interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan langsung keluhan atau pertanyaan kepada instansi terkait.

Program Halo RRI yang disiarkan di RRI Programa 1 merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen Lembaga Penyiaran Publik dalam memfasilitasi ruang komunikasi dua arah antara publik dan pemerintah. Pemilihan tempat penelitian dengan pertimbangan yang didasarkan pada karakteristik dan keunikan program siaran.

Tabel 1.2. Perbandingan Program Siaran: RRI Bandung vs Elshinta vs PRFM

Aspek	RRI Bandung (Pro 1) Halo RRI	Radio Elshinta “News and Talk”	PRFM Bandung OPSI (Obrolan plus Solusi)
Jenis Program	Interaktif, khusus pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik	<i>Talk show</i> berita aktual dan umum	<i>Talk Show</i> interaktif, obrolan dan solusi untuk isu sosial

Fokus Siaran	Pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	Isu-isu aktual (politik, sosial, ekonomi)	Permasalahan warga (umum), solusi bersama narasumber
Spesifikasi Program Aduan Publik	Sangat spesifik - program tetap yang mengangkat isu pengaduan pelayanan publik	Tidak spesifik - tidak hanya fokus ke pengaduan publik	Cenderung umum, tidak fokus hanya pada pelayanan publik
Ruang Partisipasi Masyarakat	Terbuka - melalui telepon, media sosial, dan lain-lain	Ada, namun terbatas - lebih bersifat informatif	Terbuka - melalui telepon, media sosial, dan lain-lain
Kelebihan (Keunikan)	Mewadahi fungsi kontrol publik dan keterlibatan pemerintah dalam menjawab aduan secara langsung	Menyajikan informasi aktual dan lengkap	Interaktif dan lokal, responsif terhadap isu-isu sekitar warga

Sebagai bahan perbandingan, stasiun radio lain seperti Elshinta dan PRFM memang memiliki kesamaan dari segi format siaran yang menekankan pada berita dan *talk show* interaktif. Elshinta, misalnya, memiliki program "*News and Talk*" yang membahas isu-isu aktual dan mengajak partisipasi pendengar. Namun, formatnya masih tergolong umum dan tidak secara khusus diarahkan untuk menyiaran aduan masyarakat tentang pelayanan publik. Sementara itu, PRFM Bandung memiliki program yang cukup menarik, yakni "*OPSI (Obrolan Plus Solusi)*," yang juga menampilkan interaksi antara pendengar dan narasumber serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Meski sekilas serupa, Program *OPSI* lebih fleksibel dan tidak selalu mengangkat topik seputar layanan publik, melainkan berbagai isu sosial secara umum.

Keunikan dari Program Halo RRI terletak pada spesifikasinya yang berfokus pada pelayanan publik dan pengaduan masyarakat, serta konsistensi dalam menghadirkan perwakilan instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik secara langsung. Program ini mencerminkan fungsi pelayanan RRI sebagai media yang menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah secara

formal. Hal ini menjadi alasan utama peneliti memilih RRI Bandung sebagai objek penelitian, karena terdapat elemen kebaruan (*novelty*) dan kejelasan dalam struktur program yang tidak dijumpai secara serupa pada radio lain di wilayah Bandung.



Gambar 1. Program Halo RRI Bandung
Sumber: <https://www.instagram.com/rripro1bdg>

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi program Halo RRI karena adanya keterkaitan dengan fenomena yang ditemukan sebelumnya, yaitu belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat di tingkat provinsi oleh lembaga seperti Ombudsman. Berdasarkan hasil penelitian Kristian Widya Wicaksono dan Rima Rahmawati (2023), ditemukan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mengalami berbagai kendala dalam menangani pengaduan, seperti tidak adanya klasifikasi laporan berdasarkan tingkat kerumitan, sumber daya manusia yang terbatas, hingga belum adanya standar waktu penanganan laporan. Temuan tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem pengaduan publik yang bisa jadi dapat ditopang atau dilengkapi oleh program siaran seperti Halo RRI.

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di RRI Bandung, ditemukan bahwa aduan masyarakat yang masuk melalui program Halo RRI masih tergolong minim. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut belum dikenal secara luas atau belum sepenuhnya diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini karena masih tergolong baru dimana *launching* sejak Oktober 2024. Padahal, di sisi lain, saluran pengaduan publik seperti LAPOR! dan Ombudsman telah menerima cukup banyak laporan, meski pemanfaatannya juga masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar dari program Halo RRI sebagai sebuah program dalam menyalurkan aduan masyarakat, namun memerlukan strategi komunikasi yang lebih intensif agar program ini dapat dikenal, dipahami, dan digunakan oleh khalayak luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam strategi RRI Bandung dalam menyiarkan aduan masyarakat terkait **pelayanan publik** melalui program Halo RRI. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi media penyiaran publik dalam memperkuat fungsi kontrol sosial dan demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Adapun judul penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Strategi RRI Bandung dalam Menyiarkan Aduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Kota Bandung (Studi Kasus pada Program Halo RRI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Bandung dalam menyiarkan aduan masyarakat

melalui program “Halo RRI”, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Bandung. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, maka pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi RRI Bandung dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik melalui program “Halo RRI”?

1.3. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa program “Halo RRI” hadir sebagai media siaran dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung?
2. Bagaimana strategi RRI Bandung dalam pelaksanaan program “Halo RRI” dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung?
3. Apa tantangan RRI Bandung dalam pelaksanaan program “Halo RRI” dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam strategi RRI Bandung dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung melalui program Halo RRI. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan program “Halo RRI” hadir sebagai media siaran dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung.

2. Mengetahui strategi RRI Bandung dalam pelaksanaan program “Halo RRI” dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung.
3. Mengetahui tantangan RRI Bandung dalam pelaksanaan program “Halo RRI” dalam menyiaran aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian yang dilakukan, dapat dikategorikan menjadi dua manfaat yang terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam komunikasi massa dan strategi komunikasi penyiaran. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas bagaimana media massa, khususnya lembaga penyiaran publik seperti RRI, berperan dalam mensosialisasikan program pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini menjadi media pembelajaran langsung bagi peneliti dalam menerapkan teori komunikasi secara aplikatif, serta memperluas wawasan mengenai peran media penyiaran publik dalam menangani isu-isu sosial di tingkat lokal.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat efektivitas penyampaian pengaduan masyarakat melalui media penyiaran

publik. Dengan demikian, pemerintah dapat memaksimalkan respon dan tindak lanjut atas keluhan masyarakat secara lebih cepat dan transparan.

3) Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi program Hallo RRI sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan atau aduan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

4) Bagi LPP RRI Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi RRI Bandung dalam mengevaluasi dan mengembangkan kualitas program Hallo RRI, baik dari sisi pengelolaan aduan, pola penyiaran, maupun kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan isu-isu pelayanan publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan usulan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah pemahaman terhadap isi dan arah penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam usulan penelitian ini terdiri atas tiga bab utama, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur isi dari usulan penelitian ini.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat uraian teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori utama yang digunakan, kerangka pikir, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar pijakan dalam menganalisis data nantinya.

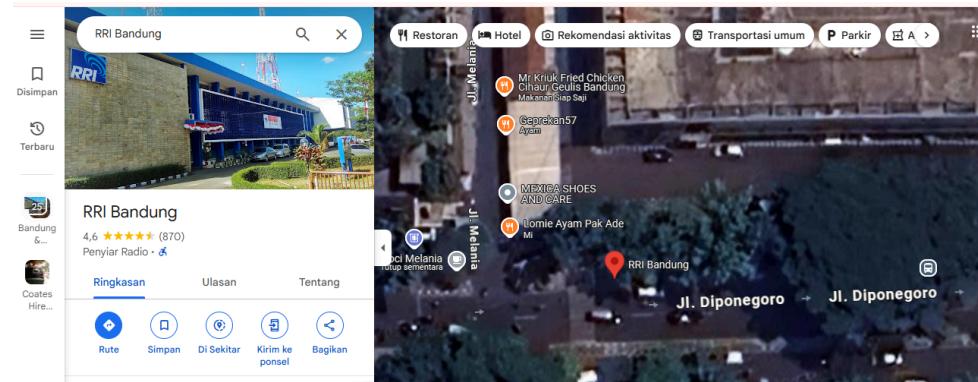
3. BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Penjabaran dalam bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan memuat hasil temuan penelitian di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap temuan akan dianalisis menggunakan teori strategi program radio menurut Morissan (2011:231) serta dikaitkan dengan strategi komunikasi media penyiaran publik dalam menyiarkan aduan masyarakat.
5. BAB V PENUTUP, Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di LPP RRI Bandung, yang beralamat di: Jl. Diponegoro No.61, Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122. Adapun letak geografis dari LPP RRI Bandung.

1) Letak Geografis

RRI Bandung terletak di pusat Kota Bandung, tepatnya di kawasan pendidikan dan pemerintahan yang strategis. Lokasinya mudah diakses menggunakan berbagai moda transportasi umum maupun pribadi. Gedung RRI Bandung berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Bandung dan berdekatan dengan beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Museum Geologi, dan Gedung Sate.



Gambar 2. Peta Lokasi LPP RRI Bandung

Sumber: <https://maps.app.goo.gl/bLwz4zF3Uqs45UDc9>

2) Bangunan Fisik

RRI Bandung memiliki bangunan bertingkat yang mencakup beberapa ruang siaran, ruang produksi, kantor redaksi berita, studio musik, ruang arsip, serta area publik seperti ruang tamu dan auditorium. Terdapat pula area parkir dan taman kecil yang menunjang kenyamanan lingkungan kerja.



Gambar 3. Bangunan Fisik LPP RRI Bandung

Sumber: <https://maps.app.goo.gl/Q6EAUCuiGSBTFJNGA>

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Maret 2025 hingga Agustus 2025, yang mencakup beberapa tahapan kegiatan seperti pra-riset, pengumpulan data, observasi, wawancara,

dokumentasi, hingga penyusunan dan penyelesaian laporan penelitian. Rincian kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Rencana Waktu Pelaksanaan Penelitian

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2025)																								
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pra-Riset dan Observasi Awal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengumpulan dan Studi Literatur					1	2	3	4																	
Penyusunan Usulan Penelitian									1	2	3	4													
Pengumpulan Data (Wawancara dan Observasi)									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Analisis Data dan Penyusunan Hasil													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Finalisasi dan Penyusunan Laporan Penelitian																	1	2	3	4	1	2	3	4	

Dengan perencanaan waktu dan lokasi yang telah ditentukan, diharapkan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.